

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH AKIBAT SALAH OBJEK TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK
MILIK NO. 29/CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG DI HUBUNGKAN
DENGAN PASAL 385 KUHP JUNCTO PERPU NO. 51 TAHUN 1960
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA HAK**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Sugiarto

41151015160198

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan

Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

**SETTLEMENT OF LAND TENURE AND OWNERSHIP DISPUTES
DUE TO WRONG LAND OBJECT IN PRIVATE RIGHTS SERT. 29 /
CIPEUNDEUY, SUBANG REGENCY CONNECTED WITH ARTICLE 385
JUNCTO PERPU KUHP NO. 51 OF 1960 CONCERNING PROHIBITION
OF LAND USE WITHOUT RIGHT**

“LEGAL MEMORANDUM”

**Asked To Fulfill The Degree Of Law At The Faculty Of Law Of
Langlangbuana University Bandung**

By : Sugiarto

41151015160198

Special Program : Criminal Law

Under The Guidance Of :

Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sugiarto
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015160198
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Legal Memorandum
**Judul Penulisan Tugas Akhir : PENYELESAIAN SENGKETA
PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH AKIBAT SALAH OBJEK
TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK
MILIK NO. 29/CIPEUNDEUY,
KABUPATEN SUBANG DI
HUBUNGKAN DENGAN PASAL 385
KUHP JUNCTO PERPU NO. 51 TAHUN
1960 TENTANG LARANGAN
PEMAKAIAN TANAH TANPA HAK.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, Penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Sugiarto

41151015160198

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH AKIBAT SALAH OBJEK TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK
MILIK NO. 29/CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG DI HUBUNGKAN
DENGAN PASAL 385 KUHP JUNCTO PERPU NO. 51 TAHUN 1960
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA HAK**

Oleh : Sugiarto

ABSTRAK

Tanah sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Namun harus kita sadari bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek tanah yang sering terjadi ini merupakan penguasaan dan kepemilikan di dalam sertipikat hak milik bagi penerima haknya tidak memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan upaya hukum dari penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek di dalam sertipikat hak milik. Salah satu masalah yang muncul yaitu mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek namun untuk memberikan perlindungan bagi penerima hibah maka penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek tanah tersebut dapat dilakukan mediasi sesuai dengan kasus Sertipikat Hak Milik No.29/Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Permasalahan yang muncul dalam kasus salah penguasaan dan kepemilikan sebagian objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik NO.29/Cipeundeuy, Kabupaten Subang ini masalahnya terletak pada penguasaan dan penggunaan tanah yang bukan menjadi haknya dengan unsur kesengajaan sehingga menimbulkan konflik pertanahan. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu penerima hibah yaitu TNI AD menjadi gamang dan dipertanyakan. Masalah ini terjadi karena sebagian Sertipikat Hak Milik No. 29 a/n Subrata Ibrosetia telah di hibahkan kepada pihak TNI AD kemudian objek tanah tersebut di duduki, di kuasai dan di klaim oleh Wartam.

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan legal memorandum ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normative secara kualitatif deskriptif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum. Legal Memorandum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis..

Akhir dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Wartam termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam sistem negatif yang dianut dalam UUPA senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan, Badan Pertanahan Nasional harus segera melaksanakan proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

**SETTLEMENT OF LAND TENURE AND OWNERSHIP DISPUTES
DUE TO WRONG LAND OBJECT IN PRIVATE RIGHTS SERT. 29 /
CIPEUNDEUY, SUBANG REGENCY CONNECTED WITH ARTICLE 385
JUNCTO PERPU KUHP NO. 51 OF 1960 CONCERNING PROHIBITION
OF LAND USE WITHOUT RIGHT**

By: Sugiarto

ABSTRACT

Soil is needed for human survival. However, we must realize that ownership and ownership of land due to wrong land objects that often occur is the control and ownership in the certificate of ownership for the recipient of the rights does not meet the requirements. This study aims to determine the legal consequences and legal remedies of ownership and ownership of land due to wrong objects in the ownership certificate. One of the problems that arises is regarding the ownership and ownership of land due to wrong objects but to provide protection for the recipients of the land, the control and ownership of land due to the wrong land object can be mediated in accordance with the case of the Right of Ownership No.29 / Cipeundeuy, Subang Regency. Problems that arise in the case of misappropriation and ownership of some land objects in the Certificate of Ownership No. 29 / Cipeundeuy, Subang Regency, the core problem lies in the control and use of land which is not their right with intentional elements that cause land conflicts. Certainty and legal protection for the victims, namely grant recipients, namely the Army of the Republic of Indonesia became nervous and questionable. This problem occurs because some of the Right to Ownership Certificate No. 29 a / n Subrata Ibrosetia has been donated to the Army then the land object is occupied, controlled and claimed by Wartam.

The method used in completing this legal memorandum is by using normative legal research qualitatively that is seeking the truth through legal formulation consisting of the opinions of experts, theories and provisions of legal regulation. This legal memorandum research is conducted using normative juridical approach namely research conducted by researching library material or secondary data, the specification of this research is descriptive analytical.

The end of the discussion can be concluded that irregularities committed by Wartam are included in unlawful acts. In the negative system adopted in the LoGA, it always provides an opportunity for someone who feels that they have stronger rights to obtain legal certainty and a sense of justice, the National Land Agency must immediately carry out the process of resolving disputes and land conflicts based on applicable laws and regulations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, anugerah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir legal memorandum sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT SALAH OBJEK TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 29/CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 385 KUHP JUNCTO PERPU NO. 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA HAK**

Berbagai bantuan, bimbingan dan arahan telah banyak penulis terima dalam penyusunan legal memorandum ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, Bapak Dr. H. DENY HASPADA, S.H., Sp.1 selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan legal memorandum ini atas segala bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Kemudian, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Hernawati RAS, Dr. S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen Wali Penulis.
5. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Sarli Sahal, S.pd, selaku Kepala Sub Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Nana, Bapak Heri, Bapak Irfan, beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Para Karyawan Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
13. Semua pegawai di lingkungan Kantah Kabupaten Subang/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya di bidang SKP.
14. Dedi Haryadi, Suwarsa A. Ptnh, Yuswandi S.H sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.

15. Rekan mahasiswa Non Reg 8 dan Non Reg 9 angkatan 2015 dan 2016 sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
16. Team KKNM Desa Cikitu Pacet Kab. Bandung sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
17. Putri Wulandari S.H sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
18. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk Isteri Tercinta Erda Trisya Fitriyani S.E dan kedua orang tua, yaitu Ibunda Tjutju Aliyah dan Alm. Ayahanda Abdul Mutalib untuk segala kesabaran, dukungan baik moril maupun materil, untuk semua pengertian, semangat dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ini .

Akhirnya, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandung, 27 September 2018

Penulis

Sugiarto

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
MEMORANDUM HUKUM	ix
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	5
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960	6
B. Pasal 385 ayat (1) s.d ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	7
C. PMA/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	8

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN
PERTANAHAN**

- A. Pengertian Hukum Pidana 11
- B. Pengertian Sertipikat 18

BAB IV PENDAPAT HUKUM

- A. Penyelesaian Atas Kasus Tersebut dan Ketentuan Apa Yang di
Gunakan 23
- B. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap
Pelaku..... 25

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 33
- B. Saran 35

DAFTAR PUSTAKA x

LAMPIRAN xi

CURRICULUM VITAExii

MEMORANDUM HUKUM

**KEPADA : KEPALA SEKSI PENANGANAN MASALAH DAN
PENGENDALIAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Mayjen Sutoyo S. No. 44, Kabupaten Subang 41211

**PERIHAL : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BERKAS NO.
025/NTL.PPSKP/V/2016 OBYEK SENGKETA SERTIPIKAT
HAK MILIK NO.29 DAN NO.32 DI DESA CIPEUNDEUY
KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT**

TANGGAL : 15 MARET 2018